

ABSTRAK

Kepolisian Daerah Jawa Tengah saat ini didominasi oleh anggota polisi laki-laki yang menciptakan lembaga bersifat maskulin sehingga menghambat terwujudnya kesetaraan antara polisi laki-laki dan polisi wanita. Ketidaksetaraan ini menyebabkan lekatnya dominasi polisi laki-laki di Kepolisian Daerah Jawa Tengah serta menghambat akses perempuan dalam mendapatkan perlindungan hukum melalui pengaduan kepada polisi wanita.

Permasalahannya adalah bagaimana Kepolisian Daerah Jawa Tengah mengimplementasikan pengarusutamaan gender dan tindakan afirmasi bagi polisi wanita melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat di lembaganya dengan dasar Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *socio-legal* dengan spesifikasi deskriptif analisis, data primer dan data sekunder dikumpulkan melalui observasi dan wawancara terhadap polisi wanita di Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan pemangku jabatan kepolisian yang terkait dengan pengarusutamaan gender serta dengan studi kepustakaan.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Kepolisian Daerah Jawa Tengah telah melaksanakan pengarusutamaan gender secara insidental melalui kebijakan-kebijakan di lembaganya yaitu asesmen jabatan strategis pembuat kebijakan untuk ditempati Polwan hingga penempatan polisi wanita di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk memudahkan pengaduan terkait kasus perempuan dan anak, namun di sisi lain Kepolisian Daerah Jawa Tengah saat ini belum menyediakan tindakan afirmasi apapun kepada polisi wanita maupun calon polisi wanita yang mendaftar dengan alasan mempertahankan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kompetisi yang adil dan terbuka bagi semua gender.

Kata Kunci: ***Polisi Wanita, Pengarusutamaan Gender, Afirmasi, Kepolisian Daerah Jawa Tengah***

ABSTRACT

The Central Java Regional Police is currently dominated by male police officers creating masculine institution that hinder the realization of equality between male police and female police. This inequality causes the dominance of male police in the Central Java Regional Police and hinders women's access to legal protection through complaints to female police.

The problem is how the Central Java Regional Police implement gender mainstreaming and affirmative action for female police officers through policies made within their institution based on the Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 1 of 2020 concerning Gender Mainstreaming within the Indonesian National Police.

The method used in this study is socio-legal with descriptive analysis specifications, primary data and secondary data collected through observation and interviews with female police officers in the Central Java Regional Police and police officers related to gender mainstreaming as well as literature studies.

The results of the study reveal that the Central Java Regional Police have carried out incidental gender mainstreaming through policies in their institution, namely the assessment of strategic positions for policy makers to occupy Policewomen to the placement of female police officers in the Integrated Police Service Center (SPKT) to facilitate complaints related to cases of women and children, on the other hand the Central Java Regional Police have not yet provided any affirmative action to police women or female police candidates who register on the grounds of defending and upholding the values of meritocracy.

Keyword: Police Woman, Gender Mainstreaming, Affirmative, the Central Java Regional Police